

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu usaha yang bisa dilakukan secara individu atau bersamaan dalam suatu lembaga yang bertujuan dalam meningkatkan kesehatan, menjaga, mencegah dan mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan individual, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Bentuk pelayanan kesehatan terdiri dari dua jenis yaitu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan kedokteran. Keduanya mempunyai peran serta kewajiban yang berbeda-beda. Cara pengorganisasian yang bersifat sendiri atau perseorangan termasuk pada pelayanan kesehatan kedokteran yang tergolong pada kelompok pelayanan kedokteran sedangkan cara pengorganisasian yang dilakukan secara bersama-sama termasuk pada pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan kelompok pelayanan kesehatan masyarakat (Azwar, 2010).

Pemberian pelayanan kesehatan khususnya dalam mengobati pasien di puskesmas, unsur yang terpenting adalah obat-obatan, karena ketidakefektifan bisa memberikan pengaruh buruk untuk dana operasional puskesmas, sebab alasan yang mengakibatkan kebocoran anggaran tersebut adalah bahan perbekalan obat, hal ini karena yang menjadi tuntutan dalam pelayanan kesehatan yaitu ketersediaan obat setiap saat sehingga pengelolaan obat yang tepat akan menentukan berhasil atau tidaknya manajemen puskesmas secara keseluruhan.

Pengertian puskesmas menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas merupakan salah satu bagian penyelenggara teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang memiliki kewajiban dalam menjalankan pengembangan kesehatan di suatu daerah pekerjaan. Pelayanan kefarmasian di puskesmas memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat dimana hal ini tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan. Terdapat tiga fungsi pokok yang harus menunjang pelayanan kefarmasian di puskesmas, yakni sebagai pusat dalam menggerakkan pembangunan wawasan kesehatan, sebagai pusat untuk memberdayakan masyarakat dan sebagai pusat pelayanan

kesehatan jenjang pertama yang mencakup pelayanan kesehatan individual serta pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas terdiri atas 2 yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik.

Pelayanan kefarmasian yang umumnya adalah salah satu pelayanan yang termasuk dalam kesehatan memiliki tujuan dalam peningkatan pemakaian obat yang baik/rasional, keamanan dalam pemakaian obat dan penanganan ketidakefisienan dana obat, serta dalam peningkatan kualitas hidup orang sakit dengan mengikuti pelaksanaan pelayanan kefarmasian yang baik (*good pharmacy practices*) yang telah direkomendasikan oleh WHO. Pengelolaan obat berdasarkan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas No. 74 tahun 2016 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi aspek perencanaan obat, permintaan obat, penerimaan obat, penyimpanan obat, pendistribusian obat, pemusnahan/penarikan obat, pengendalian obat, pencatatan dan pelaporan obat serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan obat yang dikelola secara optional untuk memastikan agar terwujudnya ketetapan jumlah dan berbagai macam bahan logistik farmasi dengan menggunakan sumber-sumber yang ada misalnya tenaga kerja, dana, sarana dan perangkat lunak dalam usaha meraih tujuan yang ditentukan dalam pembagian tingkat wilayah kerja. Manajemen pengelolaan obat bertujuan dalam penyediaan obat setiap saat diperlukan seperti tentang jenis, jumlah atau kualitas yang efektif, sehingga manajemen pengelolaan obat bisa digunakan dalam proses penggerakkan dan pemberdayaan semua sumber daya yang potensial yang bisa bermanfaat agar terwujud ketersediaannya obat yang tiap kali diperlukan untuk operasional yang efektif dan efisien (Syair, 2008).

Manajemen pengelolaan obat adalah salah satu bagian terpenting dari Puskesmas. Obat yang diperlukan harus selalu ada baik itu dalam jenis dan jumlah yang cukup serta terjamin mutunya hal ini dimaksudkan agar manajemen pengelolaan obat dapat berjalan dengan baik. Ada berbagai faktor yang menyebabkan ketidakcukupan ketersediaan obat. Salah satu dari faktor tersebut yaitu faktor perencanaan kebutuhan obat dimana obat-obat tersebut tidak tepat, tidak efektif, dan tidak efisien. Pada umumnya penyebab pengelolaan obat publik

di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota terjadi karena perencanaan belum diterapkannya konsep obat esensial dan belum menggambarkan kebutuhan riil obat, realisasi penyediaan yang tidak sampai menjadi 100% sehingga mengakibatkan tingkat ketersediaan obat menjadi terhambat dan kekosongan obat (*stock out*) terjadi. Faktor yang mempengaruhi masalah pengelolaan obat yaitu terdapat pada Dinas Kesehatan Kabupaten itu sendiri dimana umumnya dalam penyediaan anggaran pengadaannya dan pengelolaannya, Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota itu juga menyediakan informasi kegiatan tentang pengelolaan obat yang akan dilakukan dan puskesmas merupakan bagian terpenting dalam pelayanan kesehatan yang menyampaikan informasi tentang penggunaan obat berdasarkan kategori penyakit dan masuknya obat ke Instalasi Farmasi Kabupaten ditentukan oleh pemasok serta berapa banyak masyarakat yang membutuhkan obat.

Sesuai hasil penelitian dari Rawia dkk (2019) tentang analisis manajemen pengelolaan obat bahwa manajemen pengelolaan obat di Puskesmas Wolaang belum dapat dikatakan sesuai dengan Permenkes No. 74 tahun 2016 yaitu tentang pelayanan kefarmasian di puskesmas karena masih ada beberapa faktor seperti penyimpanan obat, penarikan/pemusnahan obat serta pemantauan dan evaluasi obat yang tidak sesuai dengan pedoman pengelolaan obat tersebut.

Pada hasil penelitian yang dilakukan Gabriella dkk (2019) tentang analisis pengelolaan sediaan farmasi bahwa pengelolaan obat di puskesmas Bitung Barat belum sesuai dengan Permenkes No. 74 tahun 2016 yaitu tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas karena belum terlaksana dengan baik. Perencanaan obat dan permintaan obat yang dilaksanakan oleh Puskesmas sudah sesuai dengan Permenkes No. 74 Tahun 2016 karena permintaan kebutuhan obat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan dengan memasukkan laporan permintaan ke Dinas Kesehatan dalam bentuk LPLPO. Untuk tahap penerimaan di Puskesmas belum sesuai dengan permintaan yang diajukan ke Dinas Kesehatan, hal tersebut disebabkan karena kurangnya kuantitas dari sediaan farmasi yang tersedia di Dinas Kesehatan Kota Bitung. Penyimpanan obat yang dilaksanakan oleh Puskesmas sudah terealisasi dengan baik sesuai dengan Permenkes No. 74 Tahun 2016. Pendistribusian obat yang dilaksanakan oleh Puskesmas juga sudah sesuai dengan

aturan kefarmasian. Puskesmas Bitung Barat belum pernah melakukan proses pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi. Untuk pengendalian obat yang dilaksanakan oleh puskesmas telah sesuai dan terkendali. Pencatatan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh puskesmas juga sudah sesuai dengan aturan kefarmasian. Terakhir pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh puskesmas sudah terlaksana dengan baik sesuai aturan kefarmasian yang dilaksanakan oleh kepala puskesmas, tenaga kefarmasian serta pihak dari Dinas Kesehatan.

Puskesmas Tabongo merupakan salah satu puskesmas yang berada di Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan hasil observasi awal masih terdapat masalah tentang pengelolaan obat dimana tingkat ketersediaan obat belum juga sesuai dengan keperluan pelayanan kesehatan karena masih seringkali terjadi kekurangan serta kekosongan obat selain itu masih ada juga obat yang berlebih. Kekosongan obat ini terjadi karena obat yang diminta oleh puskesmas ternyata kosong juga di Dinas kesehatan sehingga akan berpengaruh pada pasien yang seharusnya mendapatkan pelayanan kebutuhan obat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana manajemen pengelolaan obat di Puskesmas Tabongo Kabupaten Gorontalo ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Mengetahui manajemen pengelolaan obat di Puskesmas Tabongo Kabupaten Gorontalo

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui perencanaan obat di Puskesmas Tabongo berdasarkan Permenkes No. 74 tahun 2016
2. Untuk mengetahui permintaan obat di Puskesmas Tabongo berdasarkan Permenkes No. 74 tahun 2016
3. Untuk mengetahui penerimaan obat di Puskesmas Tabongo berdasarkan Permenkes No. 74 tahun 2016

4. Untuk mengetahui penyimpanan obat di Puskesmas Tabongo berdasarkan Permenkes No. 74 tahun 2016
5. Untuk mengetahui pendistribusian obat di Puskesmas Tabongo berdasarkan Permenkes No. 74 tahun 2016
6. Untuk mengetahui pemusnahan/penarikan obat di Puskesmas Tabongo berdasarkan Permenkes No. 74 tahun 2016
7. Untuk mengetahui pengendalian obat di Puskesmas Tabongo berdasarkan Permenkes No. 74 tahun 2016
8. Untuk mengetahui pencatatan dan pelaporan obat di Puskesmas Tabongo berdasarkan Permenkes No. 74 tahun 2016
9. Untuk mengetahui pemantauan dan evaluasi obat di Puskesmas Tabongo berdasarkan Permenkes No. 74 tahun 2016
10. Untuk mengetahui pengelolaan obat di Puskesmas Tabongo

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat bagi peneliti**

Sebagai salah satu pengalaman berharga untuk memperluas wawasan serta tambahan ilmu pengetahuan tentang manajemen pengelolaan obat.

##### **1.4.2 Manfaat bagi instansi terkait**

Sebagai bahan rekomendasi dalam mengembangkan manajemen pengelolaan obat di Puskesmas Tabongo.

##### **1.4.3 Manfaat bagi masyarakat atau institusi**

Sebagai bahan acuan atau rekomendasi untuk peneliti berikutnya.